

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai berikut:

1. Desa Noelbaki telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangann desa, merujuk pada Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Desa Noelbaki telah melakukan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangann desa yakni pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Desa Noelbaki telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 40 ayat 2 yakni media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
4. Desa Noelbaki telah menerapkan asas akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 3 yakni semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap.
5. Dengan adanya asas transparansi yang diterapkan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, dapat menjamin masyarakat untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai dari kegiatan fisik maupun non fisik melalui spanduk yang dipajang.
6. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, memberikan dampak pada pembangunan fisik dan non fisik bagi masyarakat, seperti untuk pembangunan fisik, terakomodirnya pembangunan rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang lolos verifikasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, untuk pembangunan non fisik melalui penerapan asas transparansi memberikan berdampak keterbukaan dalam

penyelenggaraan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang memberikan hasil output kesejahteraan masyarakat Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pengelolaan dana desa ditingkatkan melalui pelatihan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Diharapkan agar pihak desa menerapkan tahapan Pembinaan dan Pengawasannya, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan pada saat penerapan program/kegiatan dilapangan.
3. Diharapkan pihak desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan mitra terkait seperti LSM, Ormas, Lembaga Agama, dll guna peningkatan kapasitas dan kegiatan non fisik lainnya.
4. Diharapkan pihak desa dapat menyediakan profil desa secara online, untuk memudahkan informasi dan komunikasi via online di era digitalisasi seperti saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arifin, J. (2008). *Statistik bisnis terapan dengan Microsoft Excel 2007*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah (2015), *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- David, Held (2004). *Demokrasi dan tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 180-181.
- Eko, Suroto dkk. 2016. *Dana desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana desa)*. Jakarta : Penerbit Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hasniati, 2016. *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga.
- Manila, I. GK. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmadi dan Nia Sri Sunariah. 2013. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Riyanto, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sujarweni, V.W, 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam berbagai prespektif*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 102.

### **Jurnal**

- Akhmadi, Heri. 2010. *Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*
- Bhudianto, Wahyu. 2014. *Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. *Transformasi* No. 26 Tahun 2014 Volume I Halaman 1 – 51.
- Wonda, Welio. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua*. *Jurnal EMBA*. Volume 4 Nomor 3.

### **Tesis**

- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.

Perraton, Jonathan et al., 2000. “*Economic Activity in A Globalizing World*”, dalam *David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. The Global Transformations: A Reader. Cambridge: Polity Press.*

Rahardjo 2006 Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 116.

### **Regulasi**

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Sumber pendapatan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.